



DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN KOTA

Muqaffi Ahmad Arsyah¹, Nuria Afrianti²

Universitas Insan Budi Utomo^{1,2}

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Kata kunci: masyarakat miskin kota, efisiensi anggaran, kebijakan pemerintah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan adalah kelompok orang yang tinggal di lingkungan kota namun mengalami keterbatasan dalam akses terhadap ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka biasanya tidak mempunyai pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimum. Efisiensi anggaran merupakan situasi di mana pengeluaran dana (anggaran) dilakukan dengan baik, tepat dan sesuai sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan hasil (output) yang optimal menggunakan sumber daya (input) seefisien mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak sekadar dibelanjakan, melainkan dikelola dengan bijak agar manfaatnya maksimal. Namun, dalam pelaksanaan efisiensi anggaran ini, akan muncul fenomena baru terkait dengan dinamika kesehatan masyarakat. Pemotongan anggaran

untuk sektor kesehatan, khususnya di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), adalah pengurangan dana yang tercantum dalam APBN 2025. Penurunan ini berjumlah Rp 19,6 triliun dari total anggaran sebesar Rp 105,6 triliun. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi anggaran dan mengalihkan dana tersebut, tetapi dampaknya menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas layanan kesehatan, terutama untuk program-program prioritas dan ketersediaan obat-obatan. Dampak yang Mungkin Terjadi pada Layanan Kesehatan. Pengurangan anggaran dapat memengaruhi berbagai aspek dalam layanan kesehatan, termasuk program-program yang menjadi prioritas dan ketersediaan obat. Efisiensi dan Relokasi memiliki tujuan dari pengurangan anggaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih penting.

PENDAHULUAN

Sektor kesehatan adalah komponen krusial dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berusaha untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun, pemotongan anggaran dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak pada pelaksanaan program kesehatan, terutama di daerah. Kelompok masyarakat miskin yang sangat bergantung pada subsidi dan layanan publik menjadi pihak yang paling terpengaruh. Oleh



karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana pemotongan anggaran ini memengaruhi akses, kualitas, dan hasil kesehatan masyarakat miskin.

Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemotongan anggaran di sektor kesehatan telah berdampak pada pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas, pelayanan menjadi tidak optimal, dan beban biaya kesehatan meningkat. Artikel ini menyelidiki bagaimana pemotongan anggaran tersebut memengaruhi indikator kesehatan masyarakat miskin di Indonesia.

Hak masyarakat terhadap kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara hukum, baik dalam konstitusi Indonesia maupun dalam hukum internasional. Hak-Hak Kesehatan yang Harus Diberikan Pemerintah mencakup hak-hak masyarakat dalam bidang kesehatan: Akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk pelayanan di Puskesmas, rumah sakit, dan posyandu. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi.

Masyarakat miskin kota adalah kelompok penduduk yang tinggal di daerah perkotaan tetapi memiliki keterbatasan dalam akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan dasar lainnya. Mereka umumnya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal yang Rentan bagi masyarakat miskin kota adalah penggusuran paksa karena tinggal di lahan ilegal atau tidak bersertifikat. Mereka terpinggirkan dari proses pembuatan kebijakan karena tidak memiliki akses politik atau informasi. Anak-anak dari keluarga miskin kota berisiko putus sekolah dan terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama. Tingginya angka penyakit disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan.

Efisiensi anggaran adalah kondisi di mana penggunaan dana (anggaran) dilakukan secara hemat, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan hasil (output) maksimal menggunakan sumber daya (input) seminimal mungkin. Ini berarti anggaran tidak hanya dihabiskan, tetapi digunakan secara cerdas agar manfaatnya optimal. Namun, tentu saja dalam efisiensi anggaran ini akan muncul gejala-gejala baru terhadap dinamika kesehatan masyarakat.



Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang akan diterima oleh masyarakat miskin kota, dinas kesehatan, dan tenaga kesehatan dalam menghadapi efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

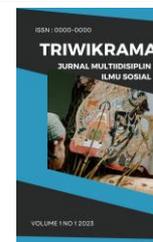
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian literatur. Kajian literatur adalah studi yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan isu yang ingin diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan teoritis serta manfaat praktisnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menerapkan metode kajian literatur, di mana semua data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian dengan literatur, yang juga disebut sebagai kajian pustaka atau tinjauan literatur. Ini adalah cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal akademik, buku referensi, ensiklopedia, dan sumber terpercaya lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup membaca, mengumpulkan, mencatat, menyortir, dan mengorganisir literatur yang diperoleh.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini diterapkan melalui pendekatan analisis kualitatif dengan metode deduktif, yang bertujuan untuk merumuskan hal-hal umum dan mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik. Selain itu, pendekatan deduktif juga berhubungan dengan fakta-fakta peristiwa tertentu dan realitas yang akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan memeriksa jurnal dan artikel ilmiah untuk digunakan sebagai dasar penelitian terkait efisiensi anggaran kesehatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengurangan anggaran untuk kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), merupakan penyunatan dana yang terdapat dalam APBN 2025. Penurunan ini mencapai jumlah sembilan belas triliun rupiah dari total anggaran sebesar seratus 1 triliun rupiah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan efisiensi anggaran dan merelokasikan dana, namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruhnya terhadap layanan kesehatan, khususnya program-program yang menjadi prioritas dan ketersediaan obat-obatan.



Dampak yang Mungkin Terjadi pada Layanan Kesehatan Penyusutan anggaran dapat memengaruhi berbagai elemen layanan kesehatan, termasuk program-program yang diutamakan dan ketersediaan obat. Efisiensi dan Relokasi Tujuan dari penyusutan anggaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan merelokasikan dana ke sektor-sektor yang lebih penting. Penghematan Biaya Operasional Kemenkes telah melaksanakan langkah-langkah seperti mengurangi biaya operasional dan penggunaan kendaraan dinas, serta menerapkan sistem kerja dari mana saja (WFA). Tujuan dari Pengurangan Anggaran Efisiensi Pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dana yang dialokasikan akan ditujukan untuk sektor-sektor yang dianggap lebih urgen. Tindakan penghematan diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Pengurangan anggaran bisa menimbulkan kekhawatiran tentang efek buruk pada pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya. Indonesia masih belum bisa dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal alokasi anggaran kesehatan. Pengurangan dana ini mengingatkan kita untuk bertanya tentang prioritas pemerintah sehubungan dengan sektor kesehatan.

Pemerintahan saat ini berusaha melakukan penghematan yang signifikan melalui peningkatan efisiensi dalam kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, anggaran banyak kementerian, lembaga, dan daerah dikurangi. Namun, pemotongan ini tidak berlaku untuk 17 kementerian atau lembaga. Karena dapat mempengaruhi pelayanan publik yang diterima, kebijakan ini pasti menarik perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Sektor-sektor yang sebenarnya lebih penting untuk pelayanan publik akan terpengaruh oleh program penghematan yang mungkin tidak adil. Sektor-sektor yang lebih penting justru mengalami penurunan, meskipun sangat penting untuk memberikan layanan yang baik.

Tetapi penghematan anggaran ini dibuat oleh pemerintah saat ini dikarenakan adanya program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk mencegah stunting, seperti yang kita ketahui bahwa stunting terjadi saat masih dalam kandungan bukan karena kandungan gizi yang di jalani anak setelah lahir, melihat ini perlu adanya setidaknya beberapa kajian yang logis untuk menjadikan pemotongan anggaran benar-benar realistis bukan asal menentukan anggaran mana yang ingin di pangkas. Seperti kita ketahui bahwa anggaran kesehatan adalah



program yang harus di prioritaskan dikarenakan masyarakat indonesia masih terjebak dalam kemiskinan ekstrim, world bank saja mencatat bahwa indonesia merupakan negara termiskin kedua di dunia, yang berarti kebutuhan akan kesehatannya sangat tinggi, hal ini perlu jadi perhatian oleh pemerintah karena jalannya negara ini melalui distribusi pajak yang dibayarkan rakyat untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakannya harus berpihak padan rakyat.

A. Pandangan Masyarakat Mengenai Pemotongan Anggaran Kesehatan

Banyak orang kecewa karena anggaran dikurangi untuk kementerian yang lebih penting bagi rakyat, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kebudayaan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan terus membelanjakan alat pertahanan, menghindari pemotongan ini. Menurutny, hal ini harus ditunda, sehingga anggaran dapat digunakan untuk layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Ini tidak berarti menolak prinsip manajemen anggaran seperti penghematan, realokasi, atau efisiensi. Namun, efisiensi juga harus dilakukan dengan benar.

Masyarakat indonesia banyak merasa bahwa pemotongan anggaran ini berdampak sangat signifikan terhadap kebutuhan mereka terhadap kesehatan. Hal ini memicu banyak gelombang protes baik dari mahasiswa dan rakyat yang dilakukan pada indonesia gelap. Yang membuat mereka merasa ini tidak benar ialah dikarenakan pembengkakan yang ada dikabinet pemerintah saat ini yang sebenarnya menjadi anggaran pembelajaran negara sangat membengkak. Seharusnya harus yang di pangkas bukan anggaran tapi pembengkakan ini terjadi karena besarnya kabinet yang ada di pemerintahan.

Dalam beberapa studi kasus yang dilakukan oleh beberapa sektor kesehatan dan penilaian bahwa masyarakat yang terdampak pada kebijakn hilirisasi tambang banyak mengalami penyakit arsenik yang melebihi ambang batas, ini harus juga menjadi perhatian terhadap pemerintahan saat ini untuk melihat bahwa program industrialisasi maupun hilirisasi yang di jalankan oleh pemerintah tidak berjalan dengan efisien dan meninggalkan luka bagi masyarakat yang berdampak. dalam kasus ini pemerintah disarankan berkoordinasi dengan beberapa universitas daerah dan kota untuk menjawab dan menyelesaikan kasus ini, sehingga proses kebijakan industrialisasi dan hilirisasi oleh pemerintah akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar.



Penting bagi pemerintah untuk benar-benar menilai kembali efisiensi anggaran ini. Khususnya, mengingat banyaknya anggota kabinet saat ini, mencapai efisiensi sulit. Ia menegaskan bahwa ini berdampak besar karena anggaran kini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, ketika hanya ada 34 kementerian. Kabinet akan terus menghabiskan uang yang cukup besar dengan peraturan yang sama. Ia menunjukkan bahwa tunjangan wakil menteri dan menteri hampir sama; bahkan, wakil menteri menerima 85% dari tunjangan menteri. Karena jumlah menteri dan wakil menteri saat ini sudah cukup banyak, serta staf khusus yang ditambahkan, anggaran pasti akan terkuras. Selain itu, banyak dari staf khusus ini tidak terkait langsung dengan tujuan kementerian dan tidak selalu membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang bersangkutan.

Tetapi banyak orang setuju bahwa hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan layanan publik harus dikurangi. Sebagai contoh, kurangi perjalanan dinas yang tidak penting, gunakan alat tulis kantor yang masih dapat digunakan, kurangi seminar yang memerlukan penginapan di hotel, dan renovasi gedung yang masih layak pakai. Saya yakin tidak akan ada masalah jika anggaran pos ini dipangkas.

Kebijakan penghematan anggaran ini harus diambil secara kolektif dan seimbang, yang berarti bukan hanya masyarakat yang menjadi target, tetapi juga pegawai pemerintah. Setidaknya, para pejabat perlu memberikan contoh dalam berhemat kepada publik. Tidak seharusnya mereka mendorong masyarakat untuk berhemat sambil tetap menjalani gaya hidup yang mewah. Hal ini jelas akan menyakiti perasaan masyarakat jika pejabat terus hidup dalam kemewahan tanpa memperhatikan situasi yang sedang berlangsung. Kita semua sebenarnya sedang menghadapi masa sulit bersama.

Masyarakat pasti dapat memahami bahwa penghematan perlu dilakukan, asalkan semua pihak, terutama pemerintah, benar-benar serius dan berkomitmen untuk mengendalikan diri agar tidak hidup dalam kemewahan dan pemborosan. Akhirnya, banyak orang berharap para pejabat menyadari kondisi yang ada di masyarakat. Ada segmen masyarakat yang terkena dampak dari penghematan ini. Misalnya, baru-baru ini banyak pegawai yang harus dirumahkan. Isu-isu seperti inilah yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus memikirkan cara agar orang tua dari anak-anak tersebut tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka serta melanjutkan kehidupan.



Berbagai komponen sistem kesehatan Indonesia pasti akan terkena dampak pemotongan anggaran kesehatan. Pemotongan anggaran ini dapat berdampak pada penyediaan layanan kesehatan, termasuk obat-obatan dan vaksin. Ini dapat mengganggu ketersediaan obat dan vaksin bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

B. Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kesehatan Masyarakat

Program pemeriksaan kesehatan yang tidak membayar Pemerintah akan meluncurkan program PKG gratis. Pemotongan anggaran dapat memengaruhi sasaran program. Program kesehatan sangat penting. Alokasi dana untuk program kesehatan utama dapat berubah sebagai akibat dari pengurangan anggaran. Hal ini dapat mengganggu program dan tujuan pembangunan kesehatan. Layanan kesehatan di wilayah yang kurang berkembang: Diperkirakan bahwa masyarakat miskin dan rentan, terutama di daerah yang tertinggal, akan mengalami penurunan kualitas layanan kesehatan karena pemangkasan anggaran. Anggaran yang tersedia sangat menentukan banyak layanan dasar di fasilitas kesehatan lokal.

Dengan adanya pemangkasan anggaran di sektor kesehatan, para profesional di bidang kesehatan harus mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Beberapa cara untuk melakukannya termasuk, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas berarti mereka harus memperbaiki cara mereka mengelola sumber daya mereka saat ini. Ini dapat dicapai melalui pengurangan pemborosan, peningkatan koordinasi program, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Dalam menentukan prioritas program pemerintah dan dinas kesehatan, fokus harus diberikan pada program kesehatan yang paling penting dan mendesak. Program yang tidak berguna atau tidak relevan harus ditunda atau dihapus. Mencari sumber dana baru Pelaku kesehatan dapat mencari dana tambahan untuk mendukung program kesehatan. Kegiatan filantropi, sektor swasta, atau kolaborasi internasional dapat menyediakan dana alternatif.

Advokasi di bidang kesehatan harus mendorong pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran kesehatan. Ada banyak cara untuk mendorong advokasi ini, seperti audiensi, seminar, atau kampanye media. Sistem kesehatan Indonesia menghadapi masalah ketika anggaran kesehatan diperpanjang. Namun, dampak negatif dari pemotongan anggaran dapat dikurangi dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Untuk memastikan



bahwa masyarakat Indonesia tetap mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan murah, para pekerja di bidang kesehatan harus bekerja sama.

Di tengah perubahan yang terjadi di Indonesia dalam politik dan ekonomi, kebijakan penghematan anggaran saat ini menjadi perhatian utama. Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, penghematan anggaran negara adalah salah satu kebijakan utama yang sedang diuji. Tujuan dari pengurangan anggaran ini adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen keuangan negara. Kebijakan ini, bagaimanapun, banyak dikritik karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dan mungkin berdampak buruk pada layanan publik.

Ada banyak perdebatan tentang efektivitas anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini. Di satu sisi, ada keinginan yang kuat untuk mengurangi pemborosan. Sebaliknya, ukuran kabinet yang sangat besar menunjukkan ketidakefektifan. Meskipun Undang-Undang Kementerian Negara memungkinkan hingga 46 kementerian, ada lebih dari 100 menteri dan pejabat setara menteri saat ini. Prinsip efisiensi itu sendiri tidak sejalan dengan ini. Selain itu, sektor pelayanan publik yang sangat penting, seperti pendidikan dan kesehatan, dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah telah memangkas dana untuk kedua sektor ini secara besar-besaran, yang memicu kemarahan publik, terutama mahasiswa.

Menurut Undang-Undang Dasar, pendidikan harus mendapatkan minimal 20% dari APBN atau APBD. Pemotongan ini bertentangan dengan konstitusi dan tujuan negara untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Menurut pemerintah, anggaran dioptimalkan untuk menyediakan dana untuk proyek strategis. Salah satu contohnya adalah pembentukan Danantara, sebuah perusahaan induk untuk BUMN. Namun, seorang Guru Besar di UMS mengingatkan bahwa model seperti ini pernah menimbulkan masalah di negara lain. Salah satu contohnya adalah skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. Bagaimana kinerja dan independensi Danantara ini? Apakah ini akan benar-benar meningkatkan BUMN atau justru menciptakan peluang baru untuk korupsi politik yang belum bersih?

Selain berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, kebijakan efisiensi juga menyebabkan PHK di banyak sektor, terutama bagi pekerja honorer dan pekerja di industri yang bergantung pada anggaran pemerintah. Ini berdampak pada banyak hotel dan sektor jasa lainnya. Hal ini dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang dan



menghentikan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sangat bergantung pada dana dari APBN dan APBD.

Sebaliknya, anggaran untuk kepolisian, intelijen, dan pertahanan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan publik tentang prioritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Jika efisiensi benar-benar digunakan, itu harus diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya pada bidang yang mempengaruhi masyarakat secara langsung. Siswa khawatir tentang masa depan yang tidak pasti karena pemilihan kata ini. Karena pendidikan dan kesehatan yang tidak terjamin, ekonomi yang melemah, dan sistem politik yang masih korup, mereka merasa masa depan mereka tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih cerdas dalam menerapkan kebijakan. Dengan kritik yang semakin meningkat terhadap kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat membuat solusi yang mengutamakan keberlanjutan dan efisiensi pembangunan nasional sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Melihat fenomena kebijakan pemerintah Terhadap Efisiensi anggaran yang dilakukan ini dapat menjadi analisis kita bahwa kebijakan ini sangat bertentangan dengan program kesehatan yang harus di jalankan oleh pemerintah. Apalagi kita mengetahui bahwa efisiensi anggran dapat menyebabkan beberapa layanan kesehatan yang seharusnya gratis malah harus membayar dan apabila tidak banyak peminatnya maka program kesehatan tersebut akan dihapuskan. Ini tidak sejalan dengan keinginan rakyat dan beberapa pengamat kesehatan di indonesia karena kesehatan merupakan suatu keharusan dan negara wajib memberikannya kepada masyarakatnya bukan malah mengefisiensikannya. Kesehatan sangat berpengaruh pada masyarakat karena apabila msyarakatnya sehat maka negara dan sistem perekonomian yang dijalankan oleh rakyat akan mampu menopang pendapatan negara. Dampak efiseinsi anggaran juga sangat berpengaruh pada masyarakat miskin kota yang dimana dalam pedapatannya saja masyrakat miskin kota hanya mampu menghasilkan sekitar sepuluh ribu rupiah perhari apakah ini wajar dalam kaca mata efisensi anggaran untuk kaum miskin kota.



Daftar Pustaka

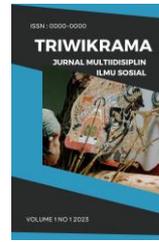
- Afianda, Z. (2019). "The Analysis of Health Operational Assistance (BOK) Implementation Aimed at Enhancing Maternal and Child Health (KIA) at the Samalanga Community Health Center, Samalanga Subdistrict, Bireuen Regency in 2018. " Institut Kesehatan Helvetia.
- Ainy (2017). "The Role of Community Health Centers in Health Sector Budgeting. " Journal of Public Health Sciences.
- Ali, H. (2014). "Analysis of Delays in Financial Reporting Submission within the Financial Department of Kulon Progo Regency. " Faculty of Economics, Malang, Mercu Buana University Yogyakarta.
- ARSITA, N. (2019). "Implementation of the Indonesian Healthy Program with a Family Approach (PIS-PK) as an Effort in Health Development. " Study in Gadingrejo District.
- Ayuntyyah Eka Wardani, D. D. , Syamsiar S. Russeng, Indar Indar, Sukri Sukri, Muhammad Asdar (2020). "Implementation of the Chronic Disease Management Program in Tajuncu Health Center, Soppeng Regency. " International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7(6): 11.
- Balgis, B., et al. "ANALYSIS OF THE HEALTH OPERATIONAL ASSISTANCE FUND BUDGET IMPLEMENTATION PROCESS AT THE HEALTH DEPARTMENT OF BUOL REGENCY. " Catalogus 6(3): 20-29.
- Choiriyah (2010). "Factors Affecting Inaccuracy in Financial Reporting: A Case Study of BKM Bunul Bejo, Malang City in 2010. " Journal of Investment 11.
- Dasmar, D. and N. Jafar (2013). "Evaluation Study of the Health Operational Assistance Program in Luwu Regency. " JAKK 2(1): 1-7.
- Diatmika, I. G. P. A. (2017). "Disclosure of Financial Reporting Through Websites and Influencing Factors. " Medika Health 4 (Public Health).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 58-68

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Jayawijaya Health Department (2019). Financial Report of BOK at Health Centers Work Area of Jayawijaya Regency.

Fadilla, R. (2019). EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF HEALTH OPERATIONAL ASSISTANCE (BOK) POLICIES AT THE PAYAKUMBUH CITY HEALTH CENTER IN 2018, Andalas University.